



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 23 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **SUNU SUBROTO**
2. Jabatan : **KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG TANGERANG I**
3. NHK : **170162**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. **1.870.100.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 88 m2/180 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA PUSAT , HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 27 m2/18 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA PUSAT , HASIL SENDIRI Rp. 170.100.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA SURAKARTA , Rp. 800.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 140 m2/140 m2 di KAB / KOTA KOTA SURAKARTA , Rp. 400.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. **347.000.000**

1. MOBIL, MERCEDES BENZ E320 SEDAN Tahun 1996, HASIL SENDIRI Rp. 97.000.000
2. MOBIL, MERCEDES BENZ VIANO Tahun 2004, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. **113.000.000**

D. SURAT BERHARGA

Rp. **813.000.000**

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. **1.136.699.052**

F. HARTA LAINNYA

Rp. **345.000.000**

Sub Total

Rp. **4.624.799.052**

III. HUTANG

Rp. **10**



IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 4.624.799.042

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 23 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **IMAM SANTOSO**
2. Jabatan : **PELELANG AHLI MADYA KPKNL TANGERANG I**
3. NHK : **152737**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. **1.700.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 192 m2/120 m2 di KAB / KOTA BANYUMAS, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 192 m2/180 m2 di KAB / KOTA BANYUMAS, WARISAN Rp. 1.200.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. **309.000.000**

1. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000
2. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000
3. LAINNYA, ORBEA MTB Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
4. MOTOR, VESPA VESPA Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 45.000.000
5. MOBIL, TOYOTA MINIBUS Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 108.000.000
6. MOBIL, HONDA MINIBUS Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 130.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. **11.000.000**

D. SURAT BERHARGA Rp. **---**

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. **16.000.000**



F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	2.036.000.000
III. HUTANG	Rp.	700.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.336.000.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.